



Strategi Pemerintah Nusa Tenggara Barat Dalam Penanganan Isu *Climate Change* Melalui Kerjasama SDG 13 Dengan *Islamic Relief Worldwide* di Kabupaten Lombok Utara

Andra Taruna Akbar

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

andratarunaakbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam penanganan isu climate change melalui kerja sama SDG 13 dengan salah satu INGO, Islamic Relief Worldwide di salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Posisi pemerintah Nusa Tenggara Barat di sini menjelaskan bahwa isu climate change adalah isu yang memang menjadi masalah global karena keadaannya yang tidak bisa diprediksi karena harus mengikuti perkembangan alam itu sendiri. Pemerintah NTB memegang peran penting terhadap isu ini karena mengingat beberapa wilayah mengalami kerugian akibat bencana alam yang salah satunya adalah perubahan iklim yang tidak menentu. metode peneltian yag digunakan adalah kulaitatif dengan teknik pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah NTB memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah uji coba penanaman pohon sebagai hasil hibah dengan Islamic Relief Worldwide sebagai bentuk reboisasi serta peningkatan hasil buah-buahan sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang lahir akibat perubahan iklim sehingga vberjalan sesuai dengan Three Realms of Action. Peneltian ini memberikan pemahaman masyarakat tentang posisi pemerintah dan INGO yang memahami bagaimana perubahan iklim ternyata mempengaruhi pembangunan secara tidak langsung tetapi merugikan secara berkala.

Kata kunci: IRW, NTB, Perubahan Iklim, SDG'S, Three Realms Of Action

Abstract

This study will explain how the strategy implemented by the West Nusa Tenggara government in handling the issue of climate change through SDG 13 collaboration with one of the INGOs, Islamic Relief Worldwide in one of the areas in North Lombok Regency. The position of the West Nusa Tenggara government here explains that the issue of climate change is an issue that is indeed a global problem because the situation cannot be predicted because it must follow the development of nature itself. The NTB government plays an important role in this issue because several regions have suffered losses due to natural disasters, one of which is uncertain climate change. The research method used is qualitative with library techniques as a data collection technique. The results of this study are that NTB utilizes the potential of North Lombok Regency as a trial area for tree planting as a result of a grant with Islamic Relief Worldwide as a form of reforestation and increasing fruit yields as a form of economic development born from climate change so that it runs in accordance with the Three Realms of Action. This study provides public understanding of the position of the government and INGOs who understand how climate change actually affects development indirectly but is detrimental periodically.

Keyword: Climate Change, IRW, NTB, SDG's, Three Realms Of Action

PENDAHULUAN

Di sekitar kita, lingkungan sering kali mengalami perubahan. Perubahan yang dirasakan banyak kita lihat pada lingkungan fisik dan ketersediaan Sumber daya yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan secara global. Sehingga di masa depan nantinya kita tidak akan mengetahui apakah kita masih bisa mengandalkan sumber daya alam untuk beberapa aspek penting. Dalam aspek pembangunan, ketersediaan sumber alam menjadi salah satu aspek penting dalam membantu berjalannya pembangunan tersebut. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang memengaruhi ketersediaan sumber alam sebagai faktor utama dari kelangsungan pembangunan itu sendiri, salah satunya adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang menjadi landasan dari pemikiran tersebut. Schipper dan Pelling menjelaskan bahwa perubahan iklim dan bencana alam memiliki peranan penting, sama halnya ketika mengaitkan kondisi pembangunan yang pengaruhnya bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan musim masuk dalam isu penting dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) (Schipper dan Pelling, 2006).

Di era globalisasi ini, banyak pihak yang akhirnya menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu fokus mereka dalam SDG. Di tingkat daerah saja, banyak kepala daerah yang akhirnya memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai salah satu dari point SDG tersebut, salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Nusa Tenggara Barat sendiri memang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam menjalankan poin-poin dalam SDG. Sesuai yang dijelaskan pada Tujuan 13 Rancangan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 bahwa tujuan 13 TPB/SDGs Provinsi NTB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka demi mencapai tujuan pemerintah dalam penanganan perubahan iklim pada 2030. Target SDGs 13 ini sendiri adalah untuk memperkuat aspek ketahanan serta adaptasi dalam berbagai kondisi terutama dalam hal iklim dan bencana alam secara global. Untuk mencapai target tersebut, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan seperti yang telah dijelaskan bahwa akan ada beberapa program maupun kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah (Bappenas, 2018).

Seperti yang dijelaskan bahwa target tujuan 13 sendiri adalah dengan melibatkan aktor non pemerintah dalam penangan isu perubahan iklim sendiri sehingga Pemerintah NTB melakukan kerja sama dengan aktor nonpemerintah. Dalam target SDGs 13, Pemerintah NTB menggandeng salah satu INGO yakni Islam *Relief Worldwide* dalam menangani isu ketahanan dan perubahan iklim melalui Penandatanganan *Joint Declaration of Commitment to Work Together for Climate Change* (SDG 13). Penandatanganan ini merupakan komitmen Pemerintah NTB dalam menguatkan implementasi dari program-program unggul NTB terutama dalam bidang bencana alam dan perubahan iklim. Salah satu fokus kerja sama ini adalah mengenai isu bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Lombok Utara . Kabupaten Lombok Utara Sendiri memang dalam beberapa tahun terakhir banyak mengalami bencana alam karena perubahan iklim yang tidak menentu. Untuk melihat data statistik bencana alam yang terjadi di KLU, maka bisa melihat pada gambar di bawah:

Wilayah	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara								
	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Lombok Utara	1	1	4	33	35	24	15	1	5
Nusa Tenggara Barat	159	96	150	835	239	98	56	29	38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar1. Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam kurun tahun 2019 hingga 2021 Kabupaten Lombok Utara sering mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor.

Walaupun di beberapa data terjadi penurunan, akan tetapi bencana alam sendiri adalah yang sangat berpengaruh di berbagai bidang kehidupan. Hingga pada tahun 2022 banyak mengalami perubahan walaupun tidak secara keseluruhan. Sehingga dapat membuktikan bahwa daerah KLU merupakan salah satu daerah rawan bencana serta sering mengalami bencana alam.



Gambar 2. Jumlah Bencana Alam di Kawasan Nusa Tenggara Barat pada 2022
Sumber: BNPD NTB

Pada gambar di atas, kejadian alam yang sering terjadi di Kawasan NTB didominasi oleh banjir dan tanah longsor. BNPD NTB sendiri menjelaskan bahwa di beberapa wilayah, terutama di KLU sendiri, bencana alam terjadi akibat intensitas curah hujan yang tidak menentu serta masalah hutan yang tidak mampu menyerap air hujan karena penebangan liar. Oleh karena itu, dengan elaborasi dengan IRW ini akan menjadi isu yang menarik untuk dilihat karena adanya kolaborasi bahwa ada urgensi terhadap isu lingkungan terutama *climate change* yang merupakan isu global serta tren SDGs yang sekarang menjadi perhatian banyak pihak dengan banyaknya elaborasi pemerintah dengan INGO.

Di sekitar kita, lingkungan sering kali mengalami perubahan. Perubahan yang dirasakan banyak kita lihat pada lingkungan fisik dan ketersediaan Sumber daya yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan secara global. Sehingga di masa depan nantinya kita tidak akan mengetahui apakah kita masih bisa mengandalkan sumber daya alam untuk beberapa aspek penting. Dalam aspek pembangunan, ketersediaan sumber alam menjadi salah satu aspek penting dalam membantu berjalannya pembangunan tersebut. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang memengaruhi ketersediaan sumber alam sebagai faktor utama dari kelangsungan pembangunan itu sendiri, salah satunya adalah perubahan cuaca. Perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang menjadi landasan dari pemikiran tersebut. Schipper dan Pelling menjelaskan bahwa perubahan iklim dan bencana alam memiliki peranan penting, sama halnya ketika mengaitkan kondisi pembangunan yang pengaruhnya bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan musim masuk dalam isu penting dalam SGD's (Schipper dan Pelling, 2006).

Di era globalisasi ini, banyak pihak yang akhirnya menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu fokus mereka dalam SDG. Di tingkat daerah saja, banyak kepala daerah yang akhirnya memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai salah satu dari point SDG tersebut,



salah satunya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Nusa Tenggara Barat sendiri memang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam menjalankan poin-poin dalam SDG. Sesuai yang dijelaskan pada Tujuan 13 Rancangan Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 bahwa tujuan 13 TPB/SDGs Provinsi NTB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka demi mencapai tujuan pemerintah dalam penanganan perubahan iklim pada 2030. Target SDGs 13 ini sendiri adalah untuk memperkuat aspek ketahanan serta adaptasi dalam berbagai kondisi terutama dalam hal iklim dan bencana alam secara global. Untuk mencapai target tersebut, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan seperti yang telah dijelaskan bahwa akan ada beberapa program maupun kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah (Bappenas, 2018).

Dengan melihat aktivitas dalam kerja sama ini, pada dasarnya masih banyak pihak yang masih kurang mengetahui secara jelas mengenai detail dan analisa mengenai kerja sama Pemerintah NTB dan IRW yang mendalam yang berdampak pada informasi yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi mengenai keterlibatan IRW dalam membantu pemerintah NTB dalam mengatasi kemiskinan dan perubahan musim ternyata banyak memiliki kekurangan dan banyak penelitian yang berfokus pada isu lokal mengenai pemerintah dan Non Government Organization (NGO) seperti KONSEPSI NTB. Penulis mengangkat isu ini karena merasa bahwa banyak isu lokal yang bisa dilihat dari kacamata lain dan isu yang diangkat dianggap sebagai isu global karena kurangnya informasi. Penelitian ini hadir sebagai cara penulis menyampaikan penjelasan yang mendalam berdasarkan perspektif Hubungan Internasional yang dirasa perlu diangkat karena kurangnya penelitian mengenai perspektif pemerintah dan INGO yang ternyata bisa diangkat dalam perspektif global. Sehingga dari penjelasan diatas, rumusan masalah yang diangkat penulis adalah "bagaimana bentuk strategi Pemerintah Nusa Tenggara Barat Dalam Penanganan Isu Climate Change Melalui Kerjasama Sdg 13 Dengan Islamic Relief Worldwide Di Kabupaten Lombok Utara?"

KERANGKA BERFIKIR Sustainable Development

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) sendiri adalah sebuah jalan dari beberapa aktor (baik pemerintah maupun sebaliknya) untuk memberikan dukungan pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan bahkan budaya untuk menghadapi berbagai hal yang nantinya akan menjadi kebutuhan di masa sekarang, tetapi di satu sisi tidak merusak atau pun mengurangi kebutuhan bagi generasi lainnya. Pembangunan berkelanjutan juga berkaitan dengan bagaimana cara dari sebuah aktor untuk mencari ide untuk dapat meningkatkan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang agar nanti ekonomi akan bertumbuh yang tidak akan mengganggu aspek lainnya baik dari segi lingkungan maupun sosial. Namun, salah satu masalah yang sering ditemui oleh para peneliti adalah konsep "pertumbuhan ekonomi" yang dimaksud membutuhkan sumber daya yang besar sehingga beberapa negara yang memiliki keterbatasan tersebut akan mengalami kesusahan. Salah satu hasil laporan dari Bruntland Report (Bruntland Report, 1987). menjelaskan bahwa para ahli melihat sustainable development sendiri sebagai "*A development that is sustainable is one that satisfies current needs without jeopardizing the ability of future generations to satisfy their own.*". Yang artinya, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah hasil pembangunan yang harus berjalan stabil dimana segala generasi dapat merasakan hasil dari pembangunan tanpa harus merasa terbebani.

Teori ini memberikan gambaran bagaimana melihat pemerintah NTB bergerak untuk kesadaran bagi masyarakat menjadi hal krusial seperti pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini wajar karena melihat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah aspek penting dalam pembangunan nasional sehingga menjadi sangat jelas bahwa kerja sama ini adalah salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Sebagian orang melihat pembangunan berkelanjutan sebagai cara untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan



dengan memberikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap banyak masalah kompleks yang dihadapi masyarakat. Yang diperlukan adalah kerangka evaluasi untuk memberikan jenis keputusan, kebijakan, proyek, dan program yang memiliki potensi keberlanjutan. Kata ini biasanya dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini sambil mempertahankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya (World Commission on Environment and development: 1987).

SDGs

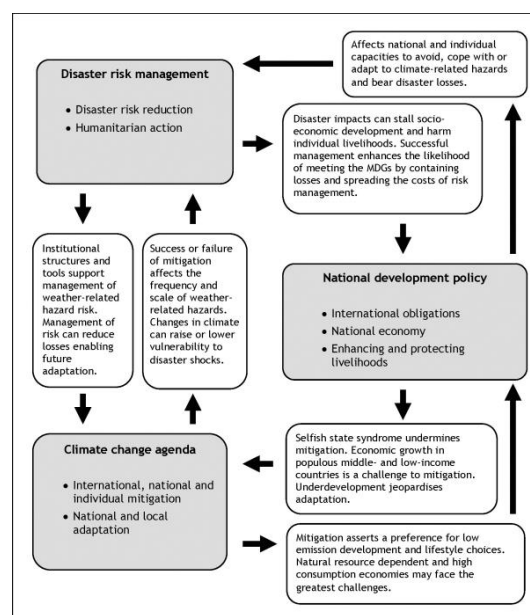
Seperti dengan namanya, posisi Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari program terdahulunya, Milenium Development Goals (MDGs). Perubahan ini adalah bukti bahwa isu SDGs adalah bentuk evaluasi dari pengembangan MDGs. SDGs lahir pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan PBB yang dilaksanakan pada 25 september, 2015, dimana para pemangku kebijakan mengambil beberapa agenda pembangunan berkelanjutan 2030, yang terdiri dari 17 serangkaian tujuan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mengarah pada penumpasan kemiskinan, bergerak untuk menyelesaikan isu ketidakadilan dan kesenjangan, serta fokus penting dalam pembahasan penulis mengenai cara para pemangku kepentingan dalam menanggapi isu perubahan iklim hingga nantinya akan berakhir pada 2030. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah program lanjutan yang sebelumnya kita kenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dimana dalam tujuan pembangunan ini hanya terdapat 8 target tujuan dengan kemiskinan sebagai salah satu isu penting dan menjadi komitmen dunia untuk mencapai tujuan tersebut pada 2015.

Kemajuan MDGs dalam menyebarkan pemikiran tersebut mampu menunjukkan bahwa dukungan dari tujuan dan target pembangunan akan mampu mempersatukan banyak pihak. Walaupun pada akhirnya kemiskinan tidak mampu diselesaikan yang juga memberikan dampak terhadap pembangunan. Walaupun begitu, MDGs memang memberikan gerakan baru dalam dunia pembangunan. Jika melangkah lebih jauh maka melangkah ke depan memberikan beberapa kasus yang belum tentu bisa memberikan dampak yang baik. MDGs sendiri memberikan gambaran bahwa mereka mengatasi beberapa sumber dibalik kemiskinan yang terjadi dan kebutuhan yang tidak sesuai dan memberikan manfaat bagi semua orang. Tujuan SDGs sendiri adalah mencapai beberapa target (baik yang dahulu masih ada maupun sebaliknya yang dirangkai dalam 17 tujuan dimana disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk membuat sebuah agenda yang nantinya agenda tersebut akan digunakan sebagai patokan pembangunan selama 15 tahun mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Tujuan tersebut nantinya akan menjadi sebuah cetak biru (blueprint) untuk menggapai masa depan yang berkelanjutan dan baik bagi seluruh masyarakat. Dan tujuan lainnya adalah untuk mengatasi masalah global yang semua negara anggota merasakan hal tersebut seperti kemiskinan, perubahan iklim, kesenjangan, keadilan, degradasi lingkungan, serta perdamaian. Sehingga diharapkan bahwa SDGs dapat menjadi transformasi baru dari pengembangan dari 8 tujuan yang sebelumnya telah resmi berakhir setelah 15 tahun berjalan (Sarvaes, 2011).

Teori ini digunakan untuk Melihat memberikan kita pemikiran tentang bagaimana sebuah isu global dipandang dari perspektif pemerintah daerah, yakni pemerintah NTB yang memanfaatkan isu tujuan 13 ini sebagai isu yang penting karena mengingat bagaimana iklim yang ada di NTB dan memahami bagaimana mengelola potensi daerah dan perlu mengetahui setiap resiko yang ada dan salah satunya adalah potensi perubahan seperti bencana alam. sehingga dengan menggandeng aktor non-pemerintah seperti IRW ini sendiri dimana fokus kerjasamanya adalah climate change dengan beberapa program yang nantinya akan diselaraskan dengan program pemerintah dirasa mampu berjalan bersama sesuai dengan slogan NTB dan tujuan IRW dalam mengatasi kemiskinan dan perubahan iklim secara global.

Three Realms Of Action: Climate Change, Disaster Risk Management And National Development Policy Linkages

Pada Gambar 3, Schipper dan Pelling memberikan penjelasan *three realms of action* dalam sebuah rangkuman dimana hubungan antara manajemen risiko bencana, perubahan iklim global serta nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Ketiga jalan tersebut berada dalam jalur yang saling berhubungan antara setiap alam secara langsung maupun sebaliknya. Seperti pada keberhasilan mitigasi perubahan lingkungan yang mampu mengurangi risiko bencana secara langsung dimana mampu mengurangi bahaya cuaca serta ketidakpastian nya, dan mengurangi ketergantungan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang dapat berpengaruh terhadap aset yang dimiliki; dampak perubahan iklim bagi pembangunan nasional memiliki pengaruh yang tidak secara langsung memberikan akibat pada basis asset yang hadir untuk membangun ketahanan dan mengatasi bencana. Ketika manajemen risiko dapat berjalan efektif, maka struktur kelembagaan dan alat manajemen mampu merespon guncangan Ketika cuaca terjadi sehingga dapat menjadi tumpuan strategi adaptasi lokal dan nasional. Sehingga keberhasilan pengelolaan bencana mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk dapat beradaptasi terhadap ancaman perubahan iklim ke depannya (Schipper dan Pelling, 2006).



Gambar 5. Climate Change, Disaster Risk Management And National Development Policy Linkages

Sumber: Schipper dan Pelling

Climate Change And Development

Dampak perubahan iklim terhadap pembangunan diperkirakan akan terwujud terutama melalui dampak terhadap sumber daya alam, yang sangat diandalkan oleh masyarakat miskin, dan terhadap kesehatan manusia. Perubahan pola curah hujan dan perubahan suhu secara temporal dan spasial menambah krisis yang dihadapi sektor air dan pertanian akibat pertumbuhan populasi (Molden dan de Fraiture, 2004). Empat isu utama menjadi ciri hubungan antara perubahan iklim dan pembangunan: 1) peran industrialisasi dalam menyebabkan perubahan iklim dan perbedaan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang; 2) dampak perubahan iklim yang tidak adil terhadap negara-negara berkembang; 3) peran penting isu pembangunan dalam memengaruhi kebijakan perubahan iklim dan negosiasi politik; Dan 4) Cara perubahan iklim berinteraksi dengan kekuatan lain yang memengaruhi pembangunan, seperti globalisasi.

Konsep ini memberikan pendekatan yang mendalam mengenai program yang sedang dijalankan oleh IRW dan bagaimana meyakinkan pemerintah NTB, termasuk memberikan



bantuan NTB dalam mengatasi isu climate change di Lombok Utara, termasuk potensi yang dimiliki oleh Lombok Utara sebagai salah satu penghasil buah-buahan di NTB. Teori ini secara dasar membantu peneliti dalam mengetahui kesamaan program antara kedua belah pihak, menjaga komunitas dan penanganan terhadap bencana, serta bagaimana menyelaraskan pihak-pihak lainnya seperti masyarakat untuk diberdayakan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai keseriusan pemerintah NTB dalam membangun proyek kemanusiaan, tetapi merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah NTB yang lebih besar dalam menciptakan provinsi yang siap menghadapi iklim dan keberlanjutan.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana untuk memantau beberapa kondisi yang dilandasi oleh pemikiran filsafat yang dimana akan menjadikan penulis sebagai instrumen yang akan ditekankan pada beberapa makna ketika penulis melakukan analisa yang juga menggunakan metode analisis yang sama sebagai bentuk pengembangan penelitian penulis. Penulis menggunakan data primer melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 serta web resmi wilayah Lombok Utara. Penulis juga menggunakan pengambilan data sekunder melalui library research yang berfokus pada buku, jurnal, serta berita lokal dan resmi dari pemerintah terkait untuk dapat mengembangkan penelitian dalam pembahasan nantinya. Kriteria validitas yang digunakan adalah untuk menguji hasil strategi pemerintah NTB dengan pencapaian RAD-TPB dalam kurun 5 tahun. Ukuran keakuratan data yang diberikan dapat dipecahkan akan tetapi perlu memahami data yang lain sebagai tolak ukur penelitian dari waktu ke waktu. Dengan melihat hasilnya, akan menjelaskan bahwa isu perubahan iklim adalah salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dari banyak karena ketidakpastian dari perubahan iklim menekan para aktor bermain untuk bisa mengatasi isu tersebut dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah NTB. NTB memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah uji coba penanaman pohon sebagai hasil hibah dengan Islamic Relief Worldwide sebagai bentuk reboisasi serta peningkatan hasil buah-buahan sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang lahir akibat perubahan iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Kerja Sama Melalui Rad-Tpb

Sejak 2018, Pemerintah NTB mulai gentar melakukan kerja sama dengan berbagai aktor baik negara maupun non negara. Dalam kasus IRW, pemerintah NTB sebenarnya telah banyak melakukan kerja sama dengan IRW dalam kurun waktu yang sama ditandai dengan keterlibatan IRW dalam penetapan RAD-TPB/SDGs provinsi NTB. Awal kerja sama ini sebenarnya sudah mulai dijalankan. Para pemangku kepentingan penting dari Kuasa Pemangku Hutan (KPH), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, IRW, dan mitra terkait seperti KONSEPSI NTB, Mitra-samya, LP2DPM, LP2DER, dan Lensa hadir di Forum Group Discussion (FGD) pada 10 Februari 2021. Dalam diskusi ini, 8 KPH hadir dari pulau Sumbawa dan Lombok. Sebagai Inisiator, IRW memberikan fokus diskusi pada 2 landasan. Pertama, untuk mensinkronisasikan program perhutanan berbasis sosial yang memiliki satu tujuan, yakni menciptakan hutan lestari dan rakyat yang sejahtera. Kedua, untuk menciptakan inisiatif baru dari IRW dalam program perhutanan sosial yang diselenggarakan dengan Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan RAD-TPB/SDGs 2019-2023 sendiri melibatkan IRW dan Konsepsi serta Kelompok Kerja Perubahan Iklim yang merupakan gabungan dari beberapa wakil dari pemerintah dan NGO. Sehingga, pertemuan tersebut terus diulurkan mengenai rencana konvergensi terkait adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim.

Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB mulai melakukan inisiasi melalui respons yang diberikan terkait program yang akan dijalankan. Sebagai pihak yang berfokus pada penanganan hutan, Kepala Dinas Kehutanan sendiri memberikan sambutan serta apresiasi nya terhadap IRW. Dalam pembukaannya, NTB saat itu memang

memerlukan keterlibatan aktor ketiga dalam menangani perubahan iklim. Sehingga dengan adanya inisiasi dari IRW diharapkan akan menghasilkan sebuah program jangka panjang untuk mencapai hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera melalui konvergensi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Islamic Relief, 2021).

Dalam peran ini, pemerintah menerapkan poin pertama dalam Three Realms of Action dengan memberikan banyak isu dan menyelaraskan program yang akan dijalankan dengan IRW. Sesuai dengan yang dipahami dalam teori tersebut dimana ketika saling memahami bahwa Lombok Utara adalah salah satu wilayah yang rawan akan terjadinya bencana karena ketidakpastian cuaca dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam tanpa adanya upaya reboisasi yang akhirnya menjadi fokus dari kedua belah pihak untuk saling bertukar pikiran untuk menciptakan dan menjaga hutan yang lestari serta membantu mensejahterakan masyarakat Lombok Utara yang salah satu mata pencaharian sebagai penjual buah-buahan. Dengan kesepakatan ini menimbulkan banyak rencana konvergensi terkait adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim.

Menjaga Relasi dengan IRW

IRW mulai bekerja sama dengan beberapa pihak pada tahun 2022 untuk menjalankan berbagai program untuk menangani masalah perubahan iklim. Selama bulan Januari hingga Desember 2022, IRW dan beberapa NGO lokal serta komunitas yang ada di Lombok Timur menjalankan program Deepening Climate Change Adaptation for Prosperity, dengan dana sebesar Rp2,6 miliar. Selain itu, IRW akan melaksanakan beberapa program penting lainnya di daerah Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima dari tahun 2022 hingga 2025 melalui program Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience. Dengan anggaran sebesar Rp27,8 miliar, Pemerintah NTB akan memiliki kesempatan untuk melaksanakan program lain di daerah KLU, Lombok Barat, Bima Dompu, dan Kota Bima dengan kontribusi total dari IRW.

Hal ini dapat menjadi landasan dari bagaimana pemerintah NTB sendiri ternyata tidak mampu secara keseluruhan menyelesaikan beberapa isu Climate Change sehingga memang perlu adanya elaborasi dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan tersebut dan hal tersebut memang membuktikan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan terutama dalam isu *Climate Change* memiliki prospek yang baik bagi wilayah tersebut. Pada 16 Februari 2023, Pemerintah Provinsi NTB menandatangani *Joint Declaration of Commitment to Work Together for Climate Action* (SDG 13) dengan *Islamic Relief Worldwide* di Birmingham, UK, untuk menunjukkan bahwa NTB adalah wilayah yang memiliki kemampuan untuk bergerak maju dalam masalah perubahan iklim.



Gambar 4. Pemerintah Provinsi NTB menandatangani Pernyataan Bersama Komitmen untuk Kerja Sama untuk Aksi Pencegahan Bencana. (SDG 13)

Sumber: <https://ntbprov.go.id>

Sebagai bentuk kontribusi terhadap penanganan isu SDG 13 ini, Pemerintah NTB melalui Wakil Gubernur memberikan penjelasan dimana penandatanganan deklarasi ini sendiri adalah sebagai bentuk pondasi yang akan menguatkan beberapa implementasi dari beberapa program

unggul di NTB seperti NTB hijau, Posyandu Keluarga, Penanggulangan Kemiskinan, NTB bebas sampah, Desa Tangguh Bencana dan beberapa program lainnya dan *Islamic Relief* adalah salah satu INGO yang ikut berkontribusi besar pada pembangunan terkait isu lingkungan untuk masyarakat NTB. Terkait isu ketahanan perubahan iklim serta ketangguhan bencana sendiri sudah menjadi pembahasan awal seperti yang telah dilakukan dalam FGD. Isu ini sekaligus menjadi awal dari kegiatan IRW selama di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB selaku pihak yang terus mendampingi kegiatan IRW selama di NTB menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah memiliki sinkronisasi pemikiran yakni sama-sama memiliki tujuan pembangunan SDGs 2030.

Hal ini menjadi strategi awal pemerintah NTB untuk bisa terus ikut berkontribusi bersama IRW dalam penanganan isu *climate change*. Kontribusi ini memang sukses menarik perhatian beberapa petinggi IRW. Sebagai kepala perwakilan Asia, Shabel Firuz memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah NTB atas komitmen mereka terhadap pembangunan masyarakat komunitas yang peduli terkait isu *climate change* sesuai dengan Three Realms of Action yang menekankan pada menjaga hubungan dengan pihak IRW dan bahkan hasil dari deklarasi ini juga justru memberikan jembatan baru bagi pemerintah NTB dengan Pemerintah ikut serta dalam mendukung pembangunan jaringan pencapaian SDGs dimana nantinya kedua belah pihak (pemerintah Indonesia) dan Pakistan untuk saling menukar pikiran mengenai pencapaian SDGs dari kedua negara. Tidak hanya itu, Pada 8 Juni 2023, Pemerintah NTB juga mendapatkan dana hibah dari IRW melalui pemberian 16 ribu bibit Durian senilai Rp 600 Juta yang nantinya akan dikhususkan pada Program Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Agro Mangkuaji seluas 770 hektare di Dusun Leong Desa Tegal Maja Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (Provinsi NTB, 2023).

Membangun Relasi Dengan Masyarakat Melalui Program Penanaman Pohon Durian Di Kawasan KLU

Kunjungan rombongan dari wakil Gubernur NTB pada Februari 2023 memang memberikan banyak keuntungan bagi Provinsi NTB karena secara tidak langsung juga pemerintah dikatakan sukses dalam mempromosikan program yang mereka bawa untuk meningkatkan relasi mereka dengan IRW. Birmingham sebagai kantor pusat IRW sendiri merasa puas dengan kinerja yang dilakukan pemerintah NTB sendiri sehingga berbagai dukungan dari IR secara global akhirnya muncul sebagai bentuk dukungan mereka terhadap isu *climate change* yang terjadi di NTB. Seperti yang sudah diberikan oleh IR dengan melalui program "Perubahan Iklim dan pembangunan rendah" yang ada di kawasan Hkm (Hutan Kemasyarakatan) Agro Mangkuaji dengan luas 770 hektar. Wilayah ini telah menjadi wilayah strategi penanaman pohon buah yakni di Dusun Leong, Desa Tegal Maja, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara pada 8 Juni, 2023. Penyerahan dana sebesar Rp600 juta diserahkan dalam bentuk 16 ribu bibit tanaman durian. Dalam penyerahan ini hadir juga beberapa instansi seperti Kepala Kementerian Dinas LHK Provinsi NTB (Islamic Relief, 2023).

Penyerahan ini adalah program awal dari IRW dari kampanye *Global Climate Justice*. Berdasarkan data yang didapatkan oleh IRW sendiri melalui penjelasan CEO IR Indonesia, Nanang Subada Dirja menjelaskan bahwa 40 persen kemiskinan yang ada banyak terjadi di kawasan hutan sehingga perlu adanya keadilan iklim melalui investasi penanaman yang dimana semua orang bisa merasakan manfaatnya serta dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. sebenarnya target yang ingin dicapai oleh IRW sendiri adalah penanaman 300 ribu pohon disebarkan di beberapa kota dan kabupaten yang tersebar di NTB akan tetapi KLU dijadikan sebagai prioritas karena adanya permasalahan bencana serta potensi yang dimiliki oleh Tanjung sebagai salah satu penghasil Durian terbesar di KLU. Berdasarkan pernyataan dari Bupati KLU, H Djohan Syamsu, KLU memang cocok dijadikan sebagai wilayah untuk menanam Durian serta menjamin bahwa masyarakat Leong sebagai wilayah dari HKm sendiri akan mampu mengelola bibit yang telah diberikan oleh IRW. Hal ini dapat dibuktikan melalui gambar yang menunjukan KLU sebagai salah satu lokasi potensial bagi buah-buahan, termasuk durian.

Jenis Tanaman/Kind of Plants	2020	2021	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Alpokali/ Avocado	6.416	877	6.408	4.327
Anggur/ Grape	64	109	1.778	1.979
Apel/ Apple	0	94	0	0
Belimbing/ Star Fruit	194	48	44	27
Duku/Langsat/Kokosan/ Duku	530	14	1	1
Durian/ Durian	16.487	5.351	38.584	62.532
Jambu Air/ Water Apple	1.799	1.174	1.516	4.050
Jambu Biji/ Guava	790	108	466	716
Jengkol/ Jengkol	0	55	6	6
Jerak Besar/ Pometia	324	0	27	24
Jerak Siam/Keprok/ Orange/Cassipouva	2.845	276	156	1.142
Mangga/ Mango	95.781	2.395	36.693	241.104
Mangga/ Mangosteen	978	322	2.711	8.157
Malaga/ Gontano/Melajo	511	446	640	404
Nangka/ Cempedak/ Jackfruit	45.668	10.612	26.227	26.716
Nenas/ Pineapple	0	4	37	25
Pepaya/ Papaya	4.481	4.623	3.942	8.346
Petal/ Twisted Cluster Bean	0	535	510	1.932

Gambar 5. Hasil produksi sayuran dan buah-buahan berdasarkan jenis angka tahunan di Kabupaten Lombok Utara (kuintal), 2020–2023
Sumber: <https://lombokutarakab.bps.go.id>

Kecamatan District	Mangga/Mango		Durian/Durian	
	2022	2023*	2022	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenang	825	1.425	640	650
Tanjung	45	92.233	285	3.076
Gangga	15.881	56.428	27.655	55.237
Kayangan	1.890	38.800	3.220	2.339
Bayan	18.053	52.219	6.784	1.230
Lombok Utara	36.693	241.104	38.584	62.532

Gambar 6. Hasil produksi buah dan jenis tumbuhan yang ada di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pendataan kabupaten Lombok Ultra (Kuintal) di tahun 2022 hingga 2023.
Sumber: <https://lombokutarakab.bps.go.id>

Kepala dinas DLHK juga memberikan instruksi kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendorong adanya pelatihan untuk mendatangkan bibit baru serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengelola potensi hutan yang masih legal seperti melakukan agroforestri karena agar nantinya masyarakat tidak melakukan penebangan liar di wilayah hutan lindung tetapi bisa mengambil hasil dari pohon Yang ditanam. Hingga akhirnya pemerintah memiliki harapan dalam 5 tahun nantinya akan menghasilkan kebaikan. (Islamic Relief, 2023). Pernyataan Kepala DLHK ini memang dapat menjelaskan adanya strategi untuk mengelola potensi dana hibah yang telah diberikan oleh IRW untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang artinya juga bahwa pembangunan ekonomi yang ada di KLU memiliki potensi yang berkembang. Data statistik saja menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di KLU termasuk dalam kategori yang perlahan mengalami kenaikan.

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara (Persen)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Lombok Utara	1,38	3,49	5,10

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara (Persen)		
	2018	2019	2020
Kabupaten Lombok Utara	-0,87	5,86	-7,46

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara (Persen)

Sumber: <https://lombokutarakab.bps.go.id>

Gambar diatas memberikan kita gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara sendiri perlu memang mengalami kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan akibat covid. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini dapat menjadi gambaran bahwa KLU dipilih sebagai wilayah untuk program penanaman bibit pohon durian adalah strategi pembangunan dari Pemerintah NTB melalui dana hibah yang diberikan oleh IRW sehingga potensi perubahan iklim dan bencana sendiri ternyata dapat diselaraskan dengan *Development policy* yang ternyata dalam berbagai kondisi cuaca keterlibatan pemerintah menjadi kunci sebagai gerakan pembangunan nasional yang memiliki potensi.

Dengan kebijakan membantu IRW dalam menghubungkan bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat KLU dalam menyelesaikan isu hutan dan perubahan iklim yang terhubung dengan kebijakan pemerintah NTB terkait SDGs 13. Dengan kerja sama yang berjalan bersama dengan IRW memberikan dampak positif untuk kerja sama berikutnya dengan memahami bahwa hubungan dengan IRW terus berjalan hingga tahun 2025 dimana IRW ikut serta dalam program NTB dengan misi NTB makmur mendunia dengan melanjutkan program lain terkait pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim di NTB. Salah satunya adalah program Ultra Poor Graduation yang mengarah pada peningkatan pendapat untuk masyarakat yang bertumpu pada pembangunan karbon dan ketahanan iklim, serta peningkatan pendidikan terhadap anak yatim, perumahan dan beberapa program lainnya (007al, 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa meningkatkan relasi antara pemerintah dan IRW serta program penanaman bibit durian di KLU adalah strategi yang tepat untuk menanggapi isu climate change yang tidak pasti. Karena walaupun dalam kondisi bencana alam yang memiliki potensi yang tinggi, pemerintah justru mampu mengelaborasi kan dengan kebijakan pembangunan sebagai bentuk pemulihan paska bencana melalui penanaman bibit durian sebagai potensi ekonomi serta melindungi wilayah tersebut dari ancaman perubahan iklim dan bencana sehingga three realm of action yang diterapkan ternyata mampu memberikan gambaran bahwa jalur climate change, disaster risk and national development policy sendiri ternyata berjalan beriringan selama situasi dan kondisi yang ada di sana merupakan wilayah yang besar akan potensi jika banyak pihak ikut andil dalam pengembangan untuk mewujudkan pencapaian SDGs diantara pemberi bantuan serta penerima dalam isu perubahan iklim ini.

Dengan bantuan yang diberikan oleh IRW memberikan pengaruh terhadap implikasi terhadap lingkungan NTB karena dengan adanya bantuan ini memberikan gambaran lain pemerintah dalam mengatasi isu climate change di NTB dengan memanfaatkan potensi KLU dan menyatukannya dengan bantuan dari IRW dengan mengelola dana dan benih yang dapat membantu KLU dalam menghasilkan ekonomi yang baik dan menjaga hutan agar mengurangi resiko bencana alam yang sering terjadi. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai IRW ini karena memberikan banyak perspektif dalam berbagai bidang terutama dengan pemerintah NTB yang telah dilakukan sejak lama. Salah satu rekomendasi yang



diberikan penulis adalah keterlibatan IRW dalam isu kemiskinan ekstrim dan penanganan climate change di Lombok Tengah dan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

AKADEMIK

BUKU

Molden, D. and C. de Fraiture (2004) Investing in Water for Food, Ecosystems and Livelihoods. Blue Paper Discussion Draft, Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. International Water Management Institute (IWMI), Colombo.

Okereke, C et al. 2017. Climate Change, Environment, and Development, in Paul Haslam et al. 2017. Introduction to International development, Oxford: Oxford University Press, Chapter 15.

DOKUMEN RESMI

Bappenas, 2018. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023. <https://sdgs.bappenas.go.id/product/nusa-tenggara-barat/>

Lombokutarakab, 2024. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka (2024). <https://lombokutarakab.bps.go.id/publication.html>

JURNAL

Sachs, Jeffrey D. 2005. The End of Poverty, New York: Penguin Press. Chapter 4, 11, 15,

Servaes, J. (1999). Communication for development: One World, multiple cultures. Creskill, NJ: Hampton.

Servaes, Jan. (2017). Introduction: From MDGs to SDGs, in Sustainable Development Goals, in the Asian Context, Jan Servaes (ed.), Singapore: Springer.

Schipper, L., & Pelling, M. (2006). Disaster risk, climate change and international development: scope for, and challenges to, integration. Disasters, 30(1), 19–38. doi:10.1111/j.1467-9523.2006.00304.x

NON AKADEMIK

007al. (2025, March 19). Gubernur terima Rombongan Islamic Relief Relevan di Ruang Kerjanya - anews. Ampenan News. <https://www.ampenannews.com/2025/03/gubernur-terima-rombongan-islamic-relief-relevan-di-ruang-kerjanya.html>

BPS Lombok Utara. (2023). Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Alam di Kabupaten Lombok Utara 2019-2023. Dalam <https://lombokutarakab.bps.go.id/indicator/27/897/1/jumlah-desaya-yang-mengalami-bencana-alam-di-kabupaten-lombok-utara.html>.

BPS Lombok Utara. (2023). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Utara (Persen), 2021-2023. Dalam <https://lombokutarakab.bps.go.id/indicator/52/35/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-lombok-utara.html>.

Islamic Relief, (2023). Islamic Relief Indonesia Bersama Bupati Klu Dan Dinas Lhk Ntb Tanam 16.000 Bibit Pohon Duren. Dalam <https://islamic-relief.or.id/islamic-relief-indonesia-bersama-bupati-klu-dan-dinas-lhk-ntb-tanam-16-000-bibit-pohon-duren/>.

Islamic Relief. (2021). Islamic Relief Inisiasi Program Konvergensi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Ntb. Dalam <https://islamic-relief.or.id/project/islamic-relief-inisiasi-program-konvergensi-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim-di-ntb/>

Islamic Relief, (2023). Islamic Relief Indonesia Bagikan 16 Ribu Bibit Durian. Dalam <https://islamic-relief.or.id/islamic-relief-indonesia-bagikan-16-ribu-bibit-durian/>.



- Islamic Relief. (2023). Lombok Utara Siap Runtuhkan Durian!!. Dalam <https://islamic-relief.or.id/project/lombok-utara-siap-runtuhkan-durian/>.
- Lombokutarakab. (2023). Bupati Lombok Utara Tanam 16.000 bibit Durian Kane di HKM Leong Barat. Dalam <https://ppid.lombokutarakab.go.id/berita/detail/bupati-lombok-utara-tanam-16000-bibit-durian-kane-di-hkm-leong-barat>.
- Ntbprov, (2023). Buah Manis Perjuangan Komitmen SDGs di Provinsi NTB. dalam <https://ntbprov.go.id/post/buah-manis-perjuangan-komitmen-sdgs-di-provinsi-ntb>.
- Radar Mandikan. (2023). 16 Ribu Pohon Durian Kane Ditanam di HKM Desa Tegal Maja KLU. Dalam <https://www.google.com/amp/s/radarmandalika.id/16-ribu-pohon-durian-kane-ditanam-di-hkm-desa-tegal-maja-klu/%3famp=1>.
- siaga.ntbprov. (2022). Info kebencanaan/kejadian bencana di ntb 1 januari 31 maret 2022. Dalam <https://siaga.ntbprov.go.id/info-kebencanaan/kejadian-bencana-di-ntb-1-januari---31-maret-2022>.